

# Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu Ditinjau dari Konsep Insentif Pajak Pertambahan Nilai = Value-Added Tax Borne by Government Policy Imposed on the Handover of Electrical Motorized Vehicles Based on Four-Wheeled Batteries Viewed from the Value-Added Tax Incentive Concept

Hesti Eka Suci Putri Sulandari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920537649&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Untuk mendorong kebijakan pemerintah mencapai net zero emissions di Tahun 2050, Kementerian Keuangan memberikan insentif fiskal berupa insentif PPnBM dengan tarif sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar 0% (nol persen) dari Harga Jual. Pada Tahun 2023. Pemerintah juga memberikan insentif fiskal tambahan berupa Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 yang memberikan fasilitas terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah memilih kebijakan PPN DTP dan menganalisis kebijakan insentif PPN DTP atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu ditinjau dari konsep insentif PPN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah memberikan insentif dengan skema DTP adalah karena Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu bukan tergolong ke dalam BKP strategis yang diatur di dalam Pasal 16B UU PPN sehingga pemerintah memberikan insentif pajak dengan menggunakan anggaran APBN dengan skema PPN DTP. Ditinjau dari konsep insentif PPN, pemberian insentif PPN DTP menggunakan konsep tax borne by government. Namun tidak tergolong pada kategori konsep exemption dan zero rate, yang diatur dalam ketentuan pemberian insentif PPN dalam UU PP.

..... In order to encourage government policy to net zero emissions by 2050, the Ministry of Finance has provided fiscal incentives in the form of a PPnBM incentive at a rate of 15% with a Tax Enforcement Base (DPP) of 0% (zero percent) of the Sales Price, by 2023. The Government has also provided additional fiscal incentives in the form of government value-added tax (PPN DTP) by issuing the finance minister's regulation No. 38 of 2023, which provides facilities against the delivery of four-wheel batterybased electric motor vehicles. The study aims to discover why the Government has chosen the DTP PPN policy and analyze the policy of DTP's PPN incentive on the handover of four-wheel battery-based electric motor vehicles viewed from the Value- Added Tax Incentive Concept. The research uses a quantitative approach with a postpositivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study show that the Government gives incentives with the DTP scheme because electric motor vehicles based on four-wheeled batteries certainly do not belong to the strategic BKP regulated in Article 16B of the VAT Act. Hence, the Government provides tax incentives using the APBN budget with the DTP VAT scheme. However, it does not belong to the categories of exemption and zero rate concepts, which are regulated in the provisions of the VAT incentive in the PP Act.